

MENINGKATKAN DAYA SAING KOPERASI UNTUK MENINGKATKAN KONDISI KETAHANAN NASIONAL BIDANG EKONOMI

Usman Arief¹

(Dosen Institut Teknologi Sepuluh Nopember/ e-mail: usman_arif@gmail.co.id)

Abstrak: Koperasi adalah lembaga bisnis yang berwatak sosial. Sebagai institusi bisnis, koperasi mau tak mau menghadapi kompetisi bisnis yang kian ketat. Apapun jenisnya, koperasi terus menghadapi persaingan usaha baik terhadap koperasi sejenis (produksi dan pemasaran), persaingan dengan lembaga pembiayaan non bank/perbankan bagi KSP, koperasi kredit atau koperasi yang memiliki unit simpan pinjam (USP), dan persaingan dengan ritel modern bagi Koperasi Serba Usaha (KSU), koperasi wanita, koperasi fungsional, dan koperasi masyarakat. Namun yang paling merasakan sengitnya persaingan usaha adalah koperasi yang tumbuh di masyarakat seperti KSP, kopdit, kopwan, KSU, dll. Penelitian yang telah dilakukan di Pondok Pesantren di kawasan kabupaten Blitar. Tentang Usaha-usaha mengembangkan koperasi selaras dengan zaman, agar semakin kompetitif. Model penelitian secara deskriptif kualitatif menjadi desain untuk melihat dari dekat tentang kebijakan dan usaha yang dilakukan oleh koperasi. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan yaitu; (1). Penggunaan IT untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota koperasi. (2). Melaksanakan manajemen yang memiliki transparansi dan akuntabilitas untuk meningkatkan kepercayaan anggota kepada pengelola koperasi. (3). Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (diklat) secara berkelanjutan. (4). Mengikutsertakan pengurus dan pengelola koperasi pada acara temu ilmiah yang relevan, dan belajar mandiri untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam mengelola koperasi yang semakin modern.

Kata kunci: *koperasi, daya saing, ketahanan nasional.*

¹Artikel merupakan hasil penelitian kolektif yang dilakukan oleh Usman sebagai (Ketua), Marsudi dan Windiani sebagai (Anggota).

Abstract: *Cooperation is a business institution having a social character. It, nowadays, has been challenged by tight business competition. The business challenge comes not only from similar cooperation (production and marketing), non-banking financing institution/ banking for KSP, credit and save-loan cooperation (USP), but also from modern ritel such as KSU (Koperasi Serba Usaha/ multi-business cooperation), female cooperation, functional cooperation, and community cooperation. The most difficult competition, however, is experienced by the cooperation living in community for instance: KSP, kopdit, kopwan, KSU, and many more. This study has been conducted in Islamic boarding house of Blitar district. It is a descriptive-qualitative research design. It focuses on the policy and the cooperation business. The study results: (1). the use of technology of information to increase the service on customer; (2). the implementation of transparent and accountable management to enhance the trust of the customer; (3). the organization of a sustainable education and training; (4). The participation of cooperation management on relevant scientific forum due to creating independent learning to raise their competence in organizing more modern cooperation management. .*

Pendahuluan

Koperasi banyak memiliki anggota yang kebanyakan masyarakat biasa dan berprofesi sebagai pengusaha mikro seperti penjual sembako, pedagang kaki lima, penjual sayur, dll, maka maraknya minimarket dan perbankan atau lembaga nonbank yang *nyasar* ke pengusaha kecil bahkan merambah pedesaan menjadi tantangan sekaligus ancaman dalam bisnis koperasi. Dengan perubahan bisnis yang begitu cepat serta selera dan tuntutan masyarakat yang kian meningkat, sudah seharusnya para pengurus dan pengelola koperasi meningkatkan kemampuannya. Bisnis yang terus berubah tidak bisa dihadapi dengan cara-cara tempo dahulu yang mungkin boleh jadi kurang sesuai dengan kondisi sekarang. Tidak mungkin menyelesaikan sebuah masalah baru dengan cara lama. Walaupun ada hasilnya, pasti kurang optimal. Berbagai permasalahan tersebut muncul dari dalam lingkungan bisnis tersebut

Berdasarkan konstitusi Indonesia, pengembangan ekonomi nasional dibangun di atas tiga pilar ekonomi, yaitu BUMN, swasta dan koperasi. Ketiga pilar ekonomi itu merupakan infrastruktur perekonomian Indonesia, sesuai Pasal 33 UUD 1945². Idealnya, ketiganya tertata sesuai cita-cita untuk apa negara ini didirikan. Karena itu, ketiganya harus menjadi pilar sistem perekonomian sebagai manifestasi usaha bersama atas asas kekeluargaan. Ketiganya harus mampu mewujudkan cita-cita, bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Ketiga pilar itu harus mampu mewujudkan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Semuanya diselenggarakan atas demokrasi ekonomi, dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Itulah pesan konstitusi Republik Indonesia. Pembinaan BUMN harus sesuai amanat itu dan tidak terlepas dari pembinaan dua pilar perekonomian Indonesia lainnya, yaitu swasta dan koperasi. Namun, kondisi tiga pilar perekonomian Indonesia itu, dewasa ini, belum berjalan sesuai amanat kemerdekaan. Bahwa mungkin telah menyimpang dari prinsip-prinsip perekonomian sebagaimana dikemukakan di atas. Dan yang paling memprihatinkan dari tiga pilar tersebut adalah koperasi, maka yang dibahas dalam kajian ini adalah koperasi beserta permasalahannya.

Struktur organisasi koperasi Indonesia mirip organisasi pemerintah/lembaga kemasyarakatan yang terstruktur dari primer sampai tingkat nasional. Hal ini telah menunjukkan kurang efektifnya peran organisasi sekunder dalam membantu koperasi primer. Tidak jarang menjadi instrumen eksplorasi sumberdaya daerah. Fenomena ini dimasa datang harus diubah karena adanya perubahan orientasi bisnis yang berkembang sesuai dengan globalisasi. Untuk mengubah arah ini hanya mampu dilakukan bila penataan mulai diletakkan pada daerah otonom. Selama ini koperasi diharapkan mampu berperan sebagai soko guru perekonomian Indonesia, tetapi dalam perjalanannya, untuk mensejahterakan anggotanya saja, koperasi sudah kesulitan. Hal ini terjadi karena tantangan-tantangan berat yang selalu melilit koperasi Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, bahwa saat ini perkembangan pasar begitu cepat dan kompetitif, dan koperasi hadir di tengah-tengah persaingan tersebut. Persaingan dengan usaha-usaha lain yang memiliki permodalan dan manajemen yang baik. Persaingan itu menjadi tidak seimbang, bila dikaitkan

²Republik Indonesia, "Teks UUD 1945 diamandemen"

dengan kondisi koperasi Indonesia saat ini. Koperasi saat ini merupakan badan usaha yang berbasis pada masyarakat golongan ekonomi lemah dan minimnya sumber daya manusia yang dimiliki.

Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi, hal ini berarti bahwa dalam kegiatannya Koperasi turut mengambil bagian bagi tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan itu sendiri maupun untuk masyarakat di sekitarnya. Koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotanya. Koperasi menurut Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang, atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan³. Prinsip koperasi sendiri ditegaskan dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 pasal 5, yaitu demokratis; pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha; pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal dan kemandirian⁴.

Koperasi adalah lembaga bisnis yang berwatak sosial. Sebagai institusi bisnis, koperasi mau tak mau menghadapi kompetisi bisnis yang kian ketat. Apapun jenisnya, koperasi terus menghadapi persaingan usaha baik terhadap koperasi sejenis (produksi dan pemasaran), persaingan dengan lembaga pembiayaan non bank/perbankan bagi KSP, koperasi kredit atau koperasi yang memiliki unit simpan pinjam (USP), dan persaingan dengan ritel modern bagi Koperasi Serba Usaha (KSU), koperasi wanita, koperasi fungsional, dan koperasi masyarakat.

Namun yang paling merasakan sengitnya persaingan usaha adalah koperasi yang tumbuh di masyarakat seperti KSP, kopdit, kopwan, KSU, dll. Dengan anggota yang kebanyakan masyarakat biasa dan berprofesi sebagai pengusaha mikro seperti penjual sembako, pedagang kaki lima, penjual sayur, dll, maka maraknya minimarket dan perbankan atau lembaga nonbank yang nyasar ke pengusaha kecil bahkan merambah sampai ke pedesaan menjadi tantangan sekaligus ancaman dalam bisnis koperasi.

Dengan perubahan bisnis yang begitu cepat serta selera dan tuntutan masyarakat yang kian meningkat, sudah seharusnya para pengurus dan pengelola koperasi meningkat kemampuannya. Bisnis yang terus berubah tidak bisa dihadapi dengan cara-cara tempo dahulu yang mungkin boleh jadi kurang sesuai

³Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992

⁴UU Nomor 25 Tahun 1992 pasal 5

dengan kondisi sekarang. Tidak mungkin menyelesaikan sebuah masalah baru dengan cara lama. Kalaupun ada hasilnya, pasti kurang optimal. Untuk itu perlu mengembangkan koperasi selaras dengan zaman, agar semakin kompetitif.

Metode Penelitian

Penelitian tentang meningkatkan daya saing koperasi untuk meningkatkan kondisi ketahanan nasional bidang ekonomi ini menggunakan desain penelitian *Survey Analysis*, yang dilakukan secara *Discriptive Qualitative*, dengan lokasi studi di Koperasi Pondok Pesantren Kabupaten Blitar. Adapun Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi langsung di lapangan, penyebaran kuesioner (untuk data primer), partisipasi dan wawancara mendalam (*depth interview*) dengan responden (pengurus koperasi dan anggota). Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka dan studi literatur yang berkenaan dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti yaitu kiat bisnis dalam pengembangan korporasi, khususnya koperasi-koperasi dalam wilayah binaan pondok pesantren sesuai dengan lokasi penelitian yang telah ditetapkan. Sedangkan analisa data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan diolah berdasarkan teknik dan desain kualitatif bahwa peneliti sebagai instrumen juga merupakan analisator hasil untuk dikembangkan kesimpulan berupa teori koperasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Koperasi merupakan salah satu dari tiga pelaku Pelaku ekonomi Indonesia (BUMN/BUMD, koperasi dan BUMS), dan koperasi merupakan satu-satunya pelaku usaha yang eksistensinya diakui dalam undang-undang dasar 1945, yang bahkan diharapkan dapat menjadi soko-guru perekonomian Indonesia. Meskipun tujuan ideal koperasi sebagai soko guru dalam perekonomian Indonesia, namun peran koperasi kalah jauh dibandingkan BUMN/BUMD apalagi dengan BUMS. Bahkan pada tahun 1992 dalam perekonomian global muncul trend ekonomi berbasis konglomerasi. Hal ini berpengaruh kuat dalam perekonomian bangsa dan membuat kehidupan koperasi dan semangatnya semakin tidak begitu populer lagi. Namun krisis moneter yang melanda beberapa negara di kawasan Asia (Korea, Thailand, Indonesia, Malaysia) pada tahun 1997 memberikan pembelajaran yang sangat berharga bagi pengambil kebijakan dan keputusan serta pengaturan regulasi bahwa sesungguhnya pengembangan ekonomi bangsa yang berbasis konglomerasi rentan terhadap badai krisis moneter. Sementara itu, pada saat yang sama kita dapat menyaksikan bahwa ekonomi kerakyatan dan lembaga keuangan mikro (di antaranya adalah koperasi) – yang sangat berbeda jauh

karakteristiknya dengan ekonomi konglomerasi – mampu menunjukkan daya tahannya terhadap gempuran badai krisis moneter yang melanda Indonesia. Lembaga keuangan mikro terbukti telah dapat menjaga kesinambungan hidupnya dengan mandiri. Melalui keuangan mikro kebangkitan ekonomi rakyat maupun pengurangan kemiskinan, akan dilakukan oleh rakyat sendiri. Masyarakat menemukan jalannya sendiri untuk mengatasi persoalan yang mereka hadapi. Dengan demikian sektor kelompok usaha kecil menengah (KUKM) dapat menjadi pengganjal untuk tidak terjadinya kebangkrutan perekonomian, bahkan sebaliknya dapat diharapkan sebagai motor penggerak roda perekonomian nasional untuk keluar dari krisis. Tentu saja hal ini merupakan sesuatu yang patut dicermati, pada satu sisi peranan koperasi dalam perekonomian nasional masih jauh tertinggal, namun pada sisi yang lain keberadaan koperasi dan UKM pada masa badai krisis justru memberi peranan yang cukup berarti.

Sejarah koperasi sebenarnya bukanlah organisasi usaha yang khas berasal dari Indonesia. Kegiatan berkoperasi dan organisasi koperasi pada mulanya diperkenalkan di Inggris di sekitar abad pertengahan. Pada waktu itu misi utama berkoperasi adalah untuk menolong kaum buruh dan petani yang menghadapi problem-problem ekonomi dengan menggalang kekuatan mereka sendiri. Kemudian di Perancis yang didorong oleh gerakan kaum buruh yang tertindas oleh kekuatan kapitalis sepanjang abad ke 19 dengan tujuan utamanya membangun suatu ekonomi alternatif dari asosiasi-asosiasi koperasi menggantikan perusahaan-perusahaan milik kapitalis⁵.

Ide koperasi ini kemudian menjalar ke AS dan negara-negara lainnya di dunia. Di Indonesia, koperasi diperkenalkan pada awal abad 20. Sejarah kelahiran dan berkembangnya koperasi di negara maju dan negara berkembang memang sangat diametral. Di Barat koperasi lahir sebagai gerakan untuk melawan ketidak-adilan pasar. Perekonomian pasar yang digerakkan oleh para kapitalis dalam mengejar keuntungan pribadi tidak memberi ruang gerak untuk kaum marjinal. Hal ini disebabkan karena kaum marjinal tidak mempunyai akses pada (kapital) modal yang faktor kunci bagi seorang pelaku ekonomi untuk dapat berperan secara efektif dalam perekonomian pasar. Ketidak-adilan pasar tersebut direspon oleh kaum marjinal dengan menghimpun kekuatan bersama dalam suatu wadah yang dikenal koperasi.

⁵Moene dan Wallerstein, dalam Soejono, Ibnuoe, *"Membangun Koperasi Mandiri dalam Koridor Jati Diri"*, (2008).hlm. 76.

Di negara maju gerakan koperasi telah mampu menempatkan koperasi sebagai fenomena global yang menjadikan koperasi merupakan alternatif bagi perekonomian pasar. Bahkan, di berbagai negara, pemerintah telah membuat peraturan perundangan untuk mengatur dan melindungi keberadaan koperasi sebagai respon atas tuntutan masyarakat. Sedangkan pada negara berkembang seperti Indonesia, koperasi hadir sebagai institusi yang akan menjadi mitra negara dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menempatkan koperasi sebagai instrumen negara untuk memajukan kemakmuran masyarakat. Sehingga tidaklah aneh bila pemerintah mencoba membuat pengembangan koperasi sebagai suatu gerakan massal, tanpa memperhatikan perlunya ikatan sentimental antar anggota dalam pengembangan suatu koperasi seperti yang terjadi di negara Barat

Ada beberapa masalah yang teridentifikasi di banyak koperasi-koperasi di desa-desa, terutama yang terletak di pedalaman jauh dari kota bahkan kadang-kadang permasalahan tersebut masih dijumpai di koperasi-koperasi pinggiran kota dan kota-kota kecil. Masalah-masalah tersebut harus dicarikan solusinya agar koperasi-koperasi tersebut dapat berjalan selaras dengan perkembangan zaman dan kompetitif. Dari hasil survei di beberapa koperasi di desa-desa Kabupaten Blitar teridentifikasi beberapa masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Kurang primanya pelayanan kepada anggota.
2. Masih rendahnya transparansi dan akuntabilitas para pengelola koperasi.
3. Masih rendahnya kesadaran berkoperasi anggotanya.
4. Adanya stagnasi kompetensi pengurus atau pengelola koperasi.

Dari empat rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan dari kajian ini yaitu: 1) Menemukan upaya-upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota, 2) Menemukan upaya-upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas para pengelola koperasi. 3) Menemukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran berkoperasi anggota. 4) Menemukan upaya-upaya untuk meningkatkan kompetensi pengurus atau pengelola koperasi.

Masalah kurang primanya pelayanan kepada anggota:

Pelayanan kepada anggota dikatakan berjalan secara prima, apabila anggota koperasi sebagai pelanggan mendapat layanan secara cepat dengan kualitas prima saat bertransaksi di koperasi. Guna mencapai tujuan tersebut harus digunakan perangkat IT secara memadai. Penggunaan perangkat IT atau teknologi informasi, seperti *software*, *hardware* hingga pemasangan *website* dan *e-mail* dapat mempermudah anggota berhubungan dengan koperasinya.

Penggunaan IT ini akan berdampak pada efisiensi dan efektifitas kerja serta mencegah penyalahgunaan dana koperasi. Dengan semakin membaiknya kualitas layanan kepada anggota, maka dapat diprediksi bahwa loyalitas anggota untuk bertransaksi di koperasinya semakin meningkat. Dengan kata lain, partisipasi ekonomi anggota akan terus meningkat dan omset bisnis koperasi akan semakin meningkat. Apabila kondisi di atas terwujud, berarti pelayanan kepada anggota kompetitif terhadap pelaku-pelaku usaha yang lain. Keberhasilan ini pada ujungnya akan meningkatkan kondisi ekonomi anggota koperasi pada khususnya, serta masyarakat pada umumnya. Kondisi di atas akan menciptakan kondisi ketahanan nasional bidang ekonomi yang semakin meningkat.

Masalah masih rendahnya transparansi dan akuntabilitas pengelola koperasi:

Transparansi dan akuntabilitas pengurus/pengelola koperasi dapat ditingkatkan apabila para pengurus/pengelola koperasi mempunyai keyakinan bahwa para anggota koperasi adalah pemilik sejati dari koperasi tersebut. Dengan demikian para pengurus/pengelola koperasi memiliki pandangan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan kewajiban yang harus diutamakan bukan sekedar formalitas untuk meningkatkan kepercayaan anggota kepada pengelola koperasi. Apabila anggota sebagai pemilik badan usaha koperasi ingin mengetahui kondisi serta kinerja koperasi, maka pengurus koperasi akan memenuhi keinginan tersebut dengan sukarela atau tulus ikhlas, tanpa anggota harus bersabar menunggu keinginannya terpenuhi sampai dilaksanakannya R.A.T yang terjadi setahun sekali. Salah satu contoh upaya untuk memperluas ruang transparansi dan akuntabilitas adalah pengelola koperasi memajang laporan transparansi koperasi bulanan di lokasi yang mudah dilihat oleh anggota atau di tempat pelayanan anggota. Apabila kondisi transparansi dan akuntabilitas para pengelola koperasi terwujud, berarti kinerja koperasi kompetitif terhadap kinerja badan usaha lain, yang selanjutnya dapat memajukan/ meningkatkan koperasi. Pada akhirnya keadaan ini akan meningkatkan kondisi ekonomi anggota maupun masyarakat pada umumnya, sebagai akibat dari meningkatnya tingkat kepercayaan anggota, yang berupa peningkatan transaksi, serta SHU (Sisa Hasil Usaha). Kondisi di atas akan menciptakan kondisi ketahanan nasional bidang ekonomi yang semakin meningkat.

Masalah rendahnya kesadaran berkoperasi anggota:

Masih rendahnya kesadaran berkoperasi anggota dapat ditingkatkan melalui pendidikan, pelatihan maupun penataran anggota yang dilakukan secara rutin terhadap anggota lama maupun anggota baru melalui proses pendidikan

dan pelatihan yang terus menerus dan berkesinambungan. Diharapkan dengan diklat tersebut “*mind-set*” anggota akan berubah, yang sebelumnya merasa tidak ikut memiliki koperasi, menjadi ikut memiliki koperasi, sehingga “*sense of belonging*” anggota terhadap koperasi meningkat. Jika rasa memiliki koperasi meningkat, maka anggota akan merasa punya tanggung jawab atas kemajuan koperasinya. Dengan demikian, anggota akan enggan bertransaksi dengan lembaga lain karena ia punya tanggung jawab memajukan bisnis koperasinya, salah satunya dengan berpartisipasi aktif di koperasi.

Dengan adanya kesadaran anggota yang meningkat, maka kontrol anggota ke koperasi akan semakin tinggi. Sehingga, pengurus atau pengelola akan sulit melakukan penyimpangan keuangan. Selain itu, dampak dari pendidikan dan pelatihan adalah anggota akan kritis terhadap berbagai kebijakan pengurus yang kurang menguntungkan bagi koperasinya. Karena itu, pengurus akan berpikir seribu kali jika mengeluarkan kebijakan atau tindakan yang menyimpang. Apabila kondisi kesadaran berkoperasi para anggota terwujud, maka dapat diprediksi bahwa omset koperasi akan meningkat tajam, dan pada giliran selanjutnya akan meningkatkan keuntungan usaha koperasi, dan pada ujungnya akan meningkatkan kondisi ekonomi anggota koperasi khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Atau dengan kata lain, kondisi di atas akan menciptakan kondisi ketahanan nasional bidang ekonomi yang semakin meningkat.

Masalah adanya stagnasi kompetensi pengurus atau pengelola koperasi:

Stagnasi kompetensi pengurus akan berpengaruh besar pada pengelola atau karyawan koperasi dan anggota koperasi. Akibatnya, organisasi dan bisnis koperasi seperti jalan di tempat, tidak ada perkembangan, sehingga menimbulkan kejenuhan dan frustrasi di lingkungan kerja koperasi. Tidak hanya merugikan koperasinya, pengurus dan pengelola yang kompetensinya tidak meningkat juga merugikan dirinya sendiri. Untuk itu, harus ada peningkatan kompetensi, baik di tubuh pengurus maupun pengelola koperasi agar anggota tidak lari.

Salah satu cara meng-*up grade* kompetensi adalah melalui pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara *continue* dan sesuai dengan bidang yang ditangani. Selain diklat yang difasilitasi oleh koperasi sendiri, pengurus dan pengelola bisa diikutsertakan pada lembaga training lain, seminar, dan studi banding ke koperasi lain. Itu saja belum cukup. Pengurus dan pengelola secara mandiri juga harus berusaha menambah pengetahuan tentang bisnis dan manajemen koperasi melalui buku, majalah, internet dll, secara otodidak.

Selain itu pengurus harus tahu dan menjiwai visi dan misi koperasi yang diemban, bisa menjalankan fungsi dan tugas kepengurusan dengan baik dan amanah. Pengurus juga harus bisa menyusun perencanaan strategis jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Pengelola harus bisa bekerja dengan baik untuk mewujudkan visi dan misi koperasi baik di level *manager* hingga *cleaning service*.

Jika seluruh SDM koperasi ditingkatkan kompetensinya, maka akan memberikan nilai tambah secara personal dan kinerja koperasi, dan pada akhirnya meningkatkan kepercayaan kepada anggota dan mitra koperasi. Pada ujungnya akan terbentuk koperasi yang kompetitif, kuat di bidang manajemen dan ekonomi, dan dampaknya akan meningkatkan kondisi ekonomi anggota khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Dengan kata lain, apabila kondisi di atas tercipta maka kondisi ketahanan nasional bidang ekonomi semakin meningkat.

Penutup

Dari pembahasan di atas, ditemukan beberapa masalah yang melilit gerak perkoperasian di Indonesia, dari beberapa masalah yang teridentifikasi, dicoba menawarkan beberapa solusi yang mungkin untuk diimplementasikan agar koperasi Indonesia tidak jalan di tempat, dan dapat berjalan selaras dengan kemajuan zaman dan kompetitif seperti koperasi-koperasi di Finlandia.

Adapun kesimpulan-kesimpulan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Masih banyak dijumpai koperasi-koperasi yang menghadapi masalah. Akibatnya banyak koperasi yang tidak kompetitif dan tidak dapat berkembang selaras dengan kemajuan zaman.
2. Masalah-masalah yang pada umumnya dihadapi koperasi adalah masalah kurang primanya pelayanan kepada anggota koperasi, masalah masih rendahnya transparansi dan akuntabilitas pengelola koperasi, masalah rendahnya kesadaran berkoperasi anggota, dan masalah adanya stagnasi kompetensi pengurus atau pengelola koperasi.
3. Beberapa solusi ditawarkan guna memecahkan masalah-masalah yang ada. Pemecahan masalah yang ditawarkan disesuaikan dengan masalah yang ada.
4. Dengan berhasilnya pelaksanaan pemecahan masalah, diharapkan akan terbentuk koperasi yang selaras dengan zaman, kompetitif serta dapat mengantarkan anggota ke kondisi yang sejahtera secara

*Meningkatkan Daya Saing Koperasi untuk Meningkatkan
Kondisi Ketahanan Nasional Bidang Ekonomi*

bersama-sama sesuai dengan tujuan koperasi pada umumnya dan tujuan nasional yang tercantum dalam konstitusi Indonesia. Dengan kata lain, peningkatan daya saing koperasi akan mewujudkan kondisi ketahanan nasional bidang ekonomi yang semakin meningkat.

Usman Arief

Daftar Pustaka

- Hatta, Moh, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun Kumpulan Pidato*, Jakarta: Inti Idayu, 1987.
- Soejono, Ibnoe, “*Membangun Koperasi Mandiri dalam Koridor Jati Diri*” Jakarta: LSP21-ISC, 2007.
- Sunardi, “*Teori Ketahanan Nasional*”, Jakarta: HASTANAS, 1997.
- Teks UUD 1945 yang telah diamandemen.
- Undang-undang No.25. tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, <http://www.bappenas.go.id>